

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut WHO (2019) , KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri (Mandasari, 2020).

Menurut WHO penggunaan kontrasepsi telah meningkat di banyak bagian dunia, terutama di Asia dan Amerika Latin dan terendah di Sub-Sahara Afrika. Secara global, pengguna kontrasepsi modern telah meningkat tidak signifikan dari 54% pada tahun 1990 menjadi 57,4% pada tahun 2014. Di Afrika dari 23,6% menjadi 27,6%, di Asia telah meningkat dari 60,9% menjadi 61,6%, sedangkan Amerika latin dan Karibia naik sedikit dari 66,7% menjadi 67,0%. (WHO, 2020).

Menurut informasi dari Profil Keluarga Indonesia, 67,6% pasangan dengan PUS (orang usia subur) berpartisipasi aktif dalam keluarga berencana pada tahun 2020. Jumlah ini naik 63,31% dari 2019 hingga saat ini. Menurut tren akseptor memilih metode kontrasepsi pada tahun 2020, teknik suntik dipilih oleh 72,9% di antaranya, diikuti oleh pil sebesar 19,4%. Kedua jenis alat kontrasepsi ini kurang berhasil mencegah pembuahan dibandingkan bentuk kontrasepsi lainnya karena merupakan teknik kontrasepsi jangka pendek. Setiap tahun, kecenderungan ini terlihat, karena banyak orang menggunakan teknik kontrasepsi jangka pendek daripada jangka panjang (MOP, implan, IUD dan MOW) (Profile Kesehatan Indonesia, 2020).

Menurut Peraturan BKKBN No.18 Tahun 2020 Tentang Keluarga Berencana Pasca Persalinan yang selanjutnya disingkat KBPP adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari, dengan tujuan mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat.

Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Karena Keluarga Berencana yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, maka dari itu program KB ini diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Perlu diketahui, bahwa Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan yaitu dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya (Kemenkes, 2023).

Berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) mengenai penggunaan kontrasepsi, didapatkan peningkatan persentase penggunaan kontrasepsi hormonal suntik setiap tahunnya, yang merupakan metode kontrasepsi yang banyak digunakan yaitu sekitar 50% dari semua metode (BKKBN, 2014).

Pentingnya Penggunaan Alat Kontrasepsi ialah Menghindari kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Kasus kehamilan yang tidak diinginkan sering terjadi di sekitar kita. Pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan kerap berujung pada tindakan aborsi yang berdampak pada kesehatan ibu. Penggunaan alat kontrasepsi dapat menjadi solusi untuk mengatur jarak kelahiran sehingga meminimalisir terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan juga dapat membantu tumbuh kembang anak. Perencanaan kehamilan yang baik dapat membantu pertumbuhan anak. Anak akan dapat memperoleh kasih sayang dan perhatian yang lebih banyak dari kedua orang tuanya, khususnya dalam masa tumbuh kembangnya. Ibu juga dapat memaksimalkan *Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif* bagi bayinya. Hal ini tentunya akan berbeda jika dibandingkan dengan keluarga yang memiliki banyak anak serta dapat meningkatkan kualitas keluarga. Alat kontrasepsi digunakan untuk menjarangkan kehamilan atau menjaga jarak kelahiran. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi juga dapat mengurangi resiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yang terlalu dekat atau terlalu sering. Selain itu, mengatur jarak atau jumlah kelahiran diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga, khususnya kehidupan perekonomian keluarga (Kemenkes, 2018).

Penggunaan kontrasepsi bertujuan untuk memenuhi hak reproduksi setiap orang, membantu merencanakan kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan, dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Penggunaan alat kontrasepsi secara tepat juga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, oleh karena itu pemenuhan akses dan kualitas program Keluarga Berencana (KB) sudah seharusnya menjadi prioritas dalam pelayanan Kesehatan (Kemenkes, 2021).

Kota Medan merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Sumatera Utara yang tidak luput dari target sasaran program KB. Dilihat dari kepadatan penduduk pada tahun 2019 dapat mencapai sebanyak 2.279.894 jiwa dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 2.435.252 jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 2.460.858 jiwa dan terus meingkat pada tahun 2023 hingga mencapai 2.494.512 jiwa (BPS,2023). Dengan terjadinya angka peningkatan penduduk yang dapat menyebabkan kepadatan penduduk secara terus menerus di Kota Medan, maka diterbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 52 Tahun 2017 tentang rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Masih rendah nya angka Penggunaan KB Pasca Persalinan di Kota medan bahkan menurun dari tahun 2022 ke tahun 2023 hampir 10%, Dipertegas kembali dalam Perpres No. 72 tahun 2021 Tentang: Percepatan Penurunan Stunting. Bahwa target Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) sebesar 70% pada Tahun 2024. Dan Berdasarkan data di Dinas P3APMP2KB bahwa Target KBPP 2022 sebesar 28.395 jiwa dan capaian KBPP hanya 11.066 jiwa maka didapatkan presentase 38,97% dan target KBPP tahun 2023 sebesar 32.289 jiwa dan capaian KBPP hanya 9.192 jiwa maka didapatkan presentase yaitu 28,46% dimana presentase tersebut belum mencapai ketentuan yaitu 70% dan juga masih rendah jumlah Penggunaan KBPP di Kota Medan (Dinas P3APMP2KB Kota Medan, 2023).

Peran Dinas P3APMP2KB dalam program keluarga berencana pasca pesalinan yaitu sebagai penyedia sekaligus pemasangan alat kontrasepsi langsung kepada masyarakat yang menggunakan KBPP, dengan diadakannya penyuluhan dan event yang dilakukan dalam momen penggunaan KBPP diharapkan agar

masyarakat Medan antusias dalam menggunakan KBPP. Dan alat kontrasepsi KBPP yang diminati di tahun 2022 dengan metode kontrasepsi jangka panjang yaitu Implan dengan jumlah penggunaan 3.381 jiwa, berbeda dengan tahun sebelumnya di tahun 2023 alat kontrasepsi yang diminati dengan non metode kontrasepsi jangka panjang yaitu suntik dengan penggunaan 2.735 jiwa.

Adapun alasan mengapa masih ada masyarakat Medan yang belum menggunakan KBPP yaitu salah satunya karena masih ada rasa takut untuk menggunakan KBPP, masih bingung dalam pemilihan alat KBPP yang mau digunakan, ada rasa khawatir untuk efek samping yang terjadi jika menggunakan KBPP, hal tersebut merupakan sebagian besar alasan masyarakat Medan yang belum menggunakan atau tidak menggunakan KBPP.

Permasalahan untuk meningkatkan kualitas penduduk dan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu maka peneliti akan menelaah bagaimana pengimplementasian Program Keluarga Berencana dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Pasca Persalinan sehingga mengangkat sebuah judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Pasca Persalinan Di Dinas P3APMP2KB Kota Medan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Penggunaan Alat Kontrasepsi Pasca persalinan di Kota Medan Pada Tahun 2023?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Berencana Penggunaan Alat Kontrasepsi Pasca Persalinan di Kota Medan Tahun 2023.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui faktor-faktor Implementasi Kebijakan KB Pasca Persalinan di Kota Medan, yaitu :

1. Untuk menganalisis bagian komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan KB Pasca Persalinan di Kota Medan
2. Untuk menganalisis bagian sumber daya terhadap Implementasi Kebijakan KB Pasca Persalinan di Kota Medan
3. Untuk menganalisis bagian disposisi terhadap Implementasi Kebijakan KB Pasca Persalinan di Kota Medan
4. Untuk menganalisis bagian struktur birokrasi Implementasi Kebijakan KB Pasca Persalinan di Kota Medan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi dan juga dapat memberikan wawasan baru dan refrensi jika adanya penelitian yang akan datang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitan diharapkan dapat digunakan dan menjadi wawasan baru bagi berbagai pihak, khususnya pengguna KB Pasca Persalinan dan juga Kantor Dinas P3APMP2KB Kota Medan agar dapat dijadikan refrensi untuk sebagai

masuk dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terutama KB bagi masyarakat dan Pemerintah.

